

RESENSI BUKU

Relasi Militer-Sipil dalam Politik Turki

Data Buku:
 Militer dan Politik di Turki;
 Pergeseran Politik dan Terpinggirnnya
 Militer Pasca-AKP
 M Alfian Alfian
 PT Penjuru Ilmu Sehati,
 Jakarta
 2015
 257 hlm

Di tengah hiruk revolusi di Dunia Arab yang tidak berkesudahan, tiba-tiba mata dunia tertuju ke negeri Turki. Hal itu lantaran aksi kudeta militer yang gagal terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (15/7) pekan lalu. Dalam kaitan ini, ruang diskusi media sosial pun berkembang, beragam perdebatan antara yang prokudeta dan pencinta Erdogan. Sayangnya, perdebatan-perdebatan tersebut tidak memberikan petunjuk mengenai gejolak politik di Turki yang sebenarnya.

Bagi Anda yang serius ingin mendalami terkait dinamika politik militer-sipil di Turki, buku *Militer dan Politik di Turki: Pergeseran Politik dan Terpinggirnnya Militer Pasca-AKP* karya M Alfian Alfian penting dibaca guna mendapatkan pemahaman yang lebih akurat. Dalam buku yang diangkat dari disertasi ini, Alfian mengulas detail tentang bagaimana rumitnya hubungan militer-sipil di Turki mulai sejak zaman Mestafa Kemal hingga era Erdogan.

Selama ini, militer merupakan penjaga gawang ideologi Kamalisme-sekuler. Itulah mengapa ketika pemerintahan sipil dianggap gagal atau tidak sesuai dengan ideologi negara militer merasa

memiliki tanggung jawab mengambil alih kekuasaan. Alhasil, sejak tahun 1960 tercatat militer telah beberapa kali melakukan kudeta, yaitu tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997 (Hlm 2).

Artinya, fenomena kudeta bukan hal baru di Turki. Namun, Erdogan berjanji akan mengakhiri era tersebut dengan mengembalikan militer ke barak. Terbukti, pengadilan terhadap perwira militer baik yang aktif maupun pensiunan berani ia lakukan. Tidak hanya itu, pada 30 September 2013 Erdogan mengumumkan pencabutan pelarangan pemakaian jilbab bagi para pegawai negeri di kantor-kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga publik—selain kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan militer.

Menundukkan Militer

Kenyataan di atas mengindikasikan bahwa pengaruh militer atas politik selama pemerintahan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) dibuat tidak berdaya. Apalagi, semua persyaratan Turki menjadi anggota Uni Eropa semakin nyata di bawah kepemimpinan Erdogan. Misalnya, selama tahun 2002—2007 pertumbuhan ekonomi Turki naik rata-rata 6%—7% persen per tahun. Perdagangan luar negeri melonjak dari senilai 32 miliar dolar AS pada 2002 menjadi 132 miliar dolar AS pada 2009. Perekonomian Turki juga mampu bertahan menghadapi krisis finansial global 2009. Pertumbuhan ekonomi ini juga mampu menaikkan pendapatan per kapita Turki 288% dari 3.492 dolar AS menjadi 10.079. Dan produktivitas PDB (produk domestik

bruto) menjadi rata-rata 4,85 dalam periode 2002—2010. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Rusia, Brasil, dan Korea Selatan (Hlm. 87-88).

Namun, sebagaimana umumnya kubu oposisi di parlemen, militer terus berusaha meruntuhkan kebijakan-kebijakan AKP. Dalam hal ini, hubungan sipil dan pemerintahan hingga tahun 2005 sarat dengan persaingan kekuasaan, dan hingga



2007 penuh dengan kekerasan dan konfrontasi. Pidato-pidato para tokoh militer mengangkat seputar keistimewaan militer dan ancaman nasionalisme Kemalis dan isu-isu antisekuler. Tekanan politik militer mencapai puncaknya pada 27 April 2007 melalui pernyataan tertulis yang dikenal dengan *e-memorandum*. Sayangnya, manuver militer tersebut malah menjadi bumerang karena pemerintah bereaksi keras. Bahkan, beberapa elite oposisi mengecam

langkah militer itu karena dianggap melukai demokrasi.

Adapun langkah AKP dalam upaya menutup celah militer berpolitik, yaitu mengusulkan perubahan Pasal 35 Undang-undang Internal sebab sering digunakan sebagai dalih intervensi militer ke politik. Usulan ini berhasil dimenangkan oleh AKP dalam pemungutan suara di parlemen pada akhir Juni 2013. Berdasarkan konstitusi sebelumnya, tugas angkatan bersenjata adalah melindungi Tanah Air dan Republik Turki. Namun, setelah mengalami revisi tugas militer lebih ditekankan pada pengamanan dari ancaman musuh luar negeri serta juga aktif menjaga perdamaian dunia. Terkait soal isu keagamaan atau Islam, pemerintahan AKP mengubah persepsi ancaman dari sebelumnya mengarah ke “ekstrem kanan” menjadi kelompok radikal yang mengeksploitasi agama.

Jadi, meskipun karya Alfian ini terbit tahun 2015, pembahasan di dalamnya tetap aktual melihat dinamika perebutan kekuasaan dan pengaruh antara sipil dan militer di Turki saat ini. Namun, mengingat karya tersebut ditulis untuk kepentingan riset disertasi, jangan heran jika pembaca agak mengerutkan kening dahi. Selain itu, membutuhkan juga referensi bacaan tambahan. Kendati pun begitu, kemampuan analisis buku ini cukup baik bagi pemahaman yang lebih lengkap untuk melihat peta politik Turki.

Moh Nizar, Dosen Hubungan Internasional FISIP Unila, Peneliti LCIS